



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **M. RONDHI**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **811269**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.195.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/180 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/60 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. Tanah Seluas 2.200 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
6. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 390.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, KIJANG INNOVA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	210.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.795.000.000
III. HUTANG	Rp.	210.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.585.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.